

► LRT & MRT BEROPERASI PENUH

Jakarta Bebas Macet Mulai 2023

JAKARTA — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan DKI Jakarta bebas dari kemacetan lalu lintas pada 2023 jika seluruh proyek angkutan umum massal beroperasi secara penuh.

Jaffry Prabu Prakoso
redaksi@bisnis.com

Menhub menyatakan kecepatan rata-rata kendaraan di jalanan DKI Jakarta bisa meningkat menjadi di atas 40 km per jam jika proyek pembangunan seluruh transportasi umum sudah selesai.

"MRT [mass rapid transit], LRT [light rail transit], kereta, BRT atau bus, kita tingkatkan kapasitasnya sehingga kita rencanakan 2023-2024 Jakarta sudah tidak macet," katanya di sela-sela meninjau langsung lokasi Plant Precast LRT Pancoran Jakarta, Minggu (29/4).

Oleh karena itu, Budi Karya ingin pengerjaan proyek kereta ringan atau LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) diselesaikan tepat waktu tanpa melupakan prinsip kehati-hatian.

Menhub menegaskan permintaan itu merujuk pembangunan LRT yang menelan anggaran Rp29,9 triliun dikerjakan pada malam hari sehingga perlu konsentrasi

► **Menhub memprediksi kecepatan rata-rata kendaraan di jalanan DKI Jakarta bisa meningkat di atas 40 km per jam mulai 2023.**

► **Pengerjaan seluruh proyek LRT Jabodebek kini sudah mencapai 37%.**

tinggi.

"Menurut saya progresnya sesuai jadwal, *on time* bahkan naik 2%. Dan saya juga minta ini kalau bisa lebih cepat. Jadi kalau nanti ada apa-apa tetap bisa dikendalikan waktu," katanya.

Budi Karya menegaskan fokus pemerintah mengejar proyek tepat waktu merujuk kebutuhan masyarakat Jakarta akan LRT sangat tinggi.

Menhub mencontohkan kebijakan ganjil genap nomor kendaraan di gerbang tol Cibubur yang diterapkan Kemenhub. Saat pelaksanaan kebijakan itu, imbuhnya, banyak sekali warga yang beralih menggunakan bus.

Dengan ada LRT, Menhub berharap bisa menjadi alternatif moda selain bus.

Untuk harga tiket LRT, Budi Karya memperkirakan harga yang dikutip ke masyarakat sekitar Rp12.000 per penumpang dari tarif normal sekitar Rp25.000 per penumpang. Untuk itu, pemerintah akan memberikan subsidi terhadap tiket. "Jadi ada subsidi 50%," jelasnya.

PROGRES PROYEK

Direktur Sumber Daya Manusia PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Agus Karianto mengatakan pengerjaan seluruh proyek

LRT Jabodebek kini sudah mencapai 37%. Progres LRT tersebut terbagi dalam tiga pembangunan. Untuk lintas layanan I dari Cibubur sampai dengan Cawang sudah selesai sekitar 60%, sedangkan lintas layanan II dari Cawang sampai dengan Dukuh Atas 22%. "Lintas layanan III dari Cawang sampai Bekasi Timur itu 40%," imbuhnya.

Agus menjelaskan penyelesaian tersebut terdiri atas pekerjaan bawah muli dari pondasi, *pile cap*, *pier*, *pier head* dan *u-shape*.

U-shape secara keseluruhan sudah terpasang 65% dari total 2.844 unit. Jumlah produksi telah mencapai 70% yang menggunakan teknologi dari Prancis.

Pemasangan *u-shape* dikerjakan secara simultan sehingga selesai seluruhnya pada September 2018. Kesulitan yang dihadapi

dalam pemasangan itu adalah produksi setiap teknologi tersebut berbeda-beda tergantung koordinat lengkungan juga panjang jalur dan hanya memiliki toleransi jarak 5 mm.

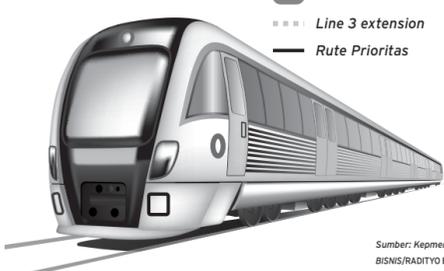
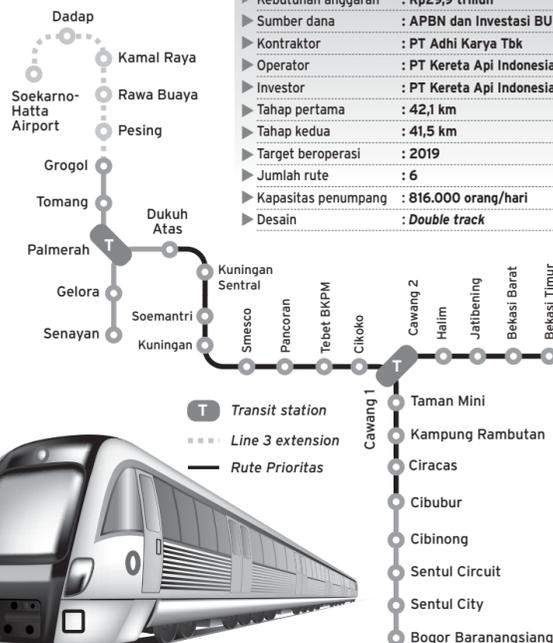
Sebelumnya, perseroan mengumumkan telah menerima pembayaran pertama senilai Rp3,42 triliun dari PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan pengerjaan LRT tahap pertama. Pada tahap berikutnya, Agus memperkirakan uji coba rel LRT bisa digelar pada pertengahan 2019.

LRT Jabodebek akan melewati 16 stasiun. Untuk lintasan Cibubur-Cawang stasiun yang disinggahi adalah Stasiun Cibubur, Stasiun Ciracas, Stasiun Kampung Rambutan, Stasiun Taman Mini,

-Profil LRT Jabodebek

► Kebutuhan anggaran	: Rp29,9 triliun
► Sumber dana	: APBN dan Investasi BUMN
► Kontraktor	: PT Adhi Karya Tbk
► Operator	: PT Kereta Api Indonesia
► Investor	: PT Kereta Api Indonesia
► Tahap pertama	: 42,1 km
► Tahap kedua	: 41,5 km
► Target beroperasi	: 2019
► Jumlah rute	: 6
► Kapasitas penumpang	: 816.000 orang/hari
► Desain	: Double track



Sumber: Kepmenhub KP 294/2015 & PT Adhi Karya Tbk. BISNIS/RADITYO EKO

dan Stasiun Cawang. Untuk lintasan Bekasi Timur-Cawang terdapat Stasiun Bekasi Timur, Stasiun Bekasi Barat, Stasiun Cikunir 2, Stasiun Cikunir, Stasiun Jati Cempaka, dan Stasiun Cawang. Khusus lintasan Cawang-Dukuh Atas,

melalui Stasiun Cawang, Stasiun Ciliwung, Stasiun Cikoko, Stasiun Pancoran, Stasiun Kuningan, Stasiun Rasuna Said, Stasiun Setiabudi, Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Cawang akan menjadi stasiun transit atau titik pertemuan dari arah Bekasi Barat, Cibubur maupun Kuningan. □

► KEBIJAKAN ANTIMACET

Ganjil Genap Efektif di 2 Ruas Tol

JAKARTA — Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menyatakan paket kebijakan penanganan macet di jalan tol Jakarta-Tangerang dan Jagorawi akan diberlakukan pada awal bulan depan setelah digelar uji coba sejak 16 April 2018.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan pihaknya akan memberlakukan pada 7 Mei 2018 atau minggu pertama Mei. "Kami targetnya awal Mei akan kami terapkan. Tanggalnya pokoknya Senin pertama Mei," katanya kepada *Bisnis*, Minggu (29/4).

Saat ini, Bambang menyatakan pihaknya menunggu landasan hukum yang akan dikeluarkan Kementerian Perhubungan berupa peraturan menteri perhubungan (Permenhub).

Dia menegaskan Permenhub soal tiga kebijakan penanganan macet di jalan tol Jakarta-Tangerang dan Jagorawi tidak jauh berbeda dengan Permenhub sebelumnya untuk ruas jalan tol Jakarta-Cikampek.

Bambang juga bersikeras tidak memberikan dispensasi kepada pada angkutan barang dan angkutan jasa kurir selama pemberlakuan tiga kebijakan antimacet di Jagorawi dan Jakarta—Tangerang.

"Tetap, kami enggak ada pengecualian. Di Tokyo saja angkutan barang cuma beroperasi 5 hari," tegasnya. Terkait dengan paket kebijakan penanganan macet di jalan tol menjadi aturan baku, Bambang juga mengatakan pihaknya masih membuka kemungkinan mengubah paket kebijakan itu.

"Ini kan bukan kebijakan tetap, kan ini dibuat karena ada *Asi-an Games*."

Dia mengatakan pihaknya akan merancang kebijakan baru untuk mengurai kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). Sebelumnya, DPP

Organda berpendapat kebijakan pemerintah membatasi operasional angkutan barang di jalan tol bisa memicu kenaikan biaya logistik.

Wakil ketua DPP Organda Ivan Kamadaja menuturkan para pengusaha angkutan barang banyak yang keberatan dengan pengaturan jam operasional truk di jalan tol.

Menurutnya, kebijakan pembatasan operasi truk di jalan tol tersebut tidak konsisten dengan permintaan Presiden Joko Widodo menu-runkan biaya logistik. Selain itu, kebijakan itu bertentangan dengan keinginan Jokowi untuk menggenjot ekspor.

Dia melanjutkan kebijakan BPTJ Kementerian Perhubungan melakukan pengaturan jam operasional angkutan barang di jalan tol kurang efektif. Padahal, angkutan barang bukan faktor penyebab macet mengingat pengguna jalan tol sebagian besar didominasi oleh kendaraan pribadi golongan I yaitu mencapai 80%.

"Kemudian golongan II dan III itu sebesar 9% dan golongan IV dan V hanya 3%, sehingga membatasi truk yaitu golongan IV dan V yang hanya sebesar 3% enggak akan efektif," katanya.

Seharusnya, imbuhnya, pemerintah membiarkan angkutan barang melintasi jalan tol untuk menekan biaya logistik. Apalagi, truk merupakan komponen utama dalam industri logistik.

"Dengan pembatasan ini apabila pakai jalan alternatif pasti *cost* lebih tinggi. Jadi katanya mau biaya logistik turun tapi kok truk yang dibatasi."

Lebih lanjut, Ivan menilai konsep pemerintah mengatur jalan tol sudah cukup benar yaitu pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan umum. Namun, dia menilai pemerintah justru mengorbankan angkutan barang dengan melarang truk sumbu tiga melintasi jalan tol. (*Dewi A Zuhriyah*)

► UJI COBA PERPANJANGAN

Bus Transjakarta melintasi koridor 13 Tendean-Ciledug di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta, Minggu (29/4). PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta melakukan ujicoba perpanjangan layanan koridor 13 Tendean-Ciledug hingga pukul 22.00 WIB yang sebelumnya beroperasi hingga pukul 19.00 WIB karena belum ada lampu penerangan.



Bisnis/Endang Mughtar

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT. GOODYEAR INDONESIA TBK

Pemegang saham PT. Goodyear Indonesia Tbk. berkedudukan di Katamadya Bogor dan beralamat di Jalan Pemuda No. 27, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor ("Perseroan") dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 23 Mei 2018
Tempat : Hotel Mandarin, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat
Waktu : RUPST : pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat - selesai
RUPS LB : Segera setelah selesai RUPST - selesai

Mata Acara:
RUPST : 1. Permohonan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan serta laporan keuangan terapan dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
RUPS LB : Perubahan kelenturan Anggaran Dasar Perseroan tentang masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tata cara pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan mata acara:
Sehubungan dengan mata acara RUPST dan RUPS LB tersebut di atas, berikut ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:
1. Mata acara pertama sampai dengan mata acara ketiga RUPST merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap RUPST. Sementara itu, mata acara keempat adalah mata acara terlang rencana penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang akan dipulihkan dalam RUPST Perseroan pada tanggal 23 Mei 2018.
2. Mata acara RUPS LB pertama bertujuan untuk menyetujui rencana perubahan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, penambahan kelenturan mengenai Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dan ketentuan mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan.
CATATAN:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPS LB tersebut, Perseroan tidak mengimprim undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga akan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPS LB, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan foto kopi KTP atau bukti jati diri pemegang saham Perseroan, di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161 sejak tanggal panggilan ini, Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan RUPST dan RUPS LB.
3. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPS LB tersebut adalah pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2018, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
4. Keputusan yang diadukan untuk semua mata acara RUPST dan RUPS LB harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk semua mata acara RUPST harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST. Sedangkan untuk mata acara RUPS LB, keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB.
5. Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPST dan RUPS LB diminta untuk menyerahkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST/RUPS LB. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
6. (a) Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak dapat hadir dalam RUPST dan RUPS LB, hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST/RUPS LB, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Oleh karena itu, para pemegang saham Perseroan disarankan untuk tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa mereka. Jika surat kuasa dari pemegang saham ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa tersebut harus dikesah oleh notaris setempat dan kemudian dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau Konsulat Indonesia di tempat masa surat kuasa tersebut diadatangani.
(b) Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat seperti tercantum dalam butir 2 di atas atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Bima Register, di Graha MR, Lantai 6A2, Jl. Pemuda No. 9, Rawamangun, Jakarta Timur 13220.
(c) Surat kuasa untuk RUPST dan RUPS LB yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya, harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir 2 di atas, selambatnya pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST/RUPS LB diadakan, yakni tanggal 18 Mei 2018.
7. Pemegang Saham Yang Berhak yang berstatus Badan Hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum") dapat diwakili dalam RUPST dan RUPS LB tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar pemegang saham yang berstatus badan hukum tersebut. Dimohon agar: (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST/RUPS LB diadakan, dan (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi Pemegang Saham Badan Hukum atau organ lain yang setara yang menjabat pada saat RUPST/RUPS LB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang, dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 2 di atas, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST/RUPS LB diselenggarakan, yakni tanggal 18 Mei 2018.
8. Untuk mempermudah pengantaran dan terbitnya RUPST/RUPS LB, Pemegang Saham Yang Berhak diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPST/RUPS LB sedikinya 20 (dua puluh) menit sebelum RUPST/RUPS LB dimulai.

Bogor, 30 April 2018
Direksi Perseroan

INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. (the "Company") hereby invites shareholders of the Company to attend the annual general meeting of shareholders (the "Meeting"), which will be convened on:

Day : Tuesday
Date : May 22, 2017
Time : 2:00 PM Western Indonesian Time
Venue : Melati Room, Wisma Indocement, Ground Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910

with the following agenda:

Agenda of the Meeting:

- Approval of the Company's annual report including supervisory report of the Board of Commissioners and ratification of the Company's consolidated financial statements for financial year 2017.
- Appropriation of the Company's net profit for financial year 2017.
- Appointment of public accountant firm to audit the Company's book for financial year 2018.
- Changes of the members of management of the Company.
- Determination of the salary and other allowances for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners of the Company.

Explanation for each agenda of the Meeting:

Agenda no 1, 2, 3 and 5 deem as a routinely yearly agendas for the Meeting of the Company as stipulated in the Articles of Association of the Company and the Regulation No. 40 year 2007 regarding the Company Law.

Agenda no 4 due to the end of the term of office of several member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Notes for the Meeting:

- Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Friday, April 27, 2018 at 4:00 PM Western Indonesian Time.
- a) Shareholders who are unable to attend the Meeting may appoint proxies to attend and vote on their behalf. In the event that such proxies are given to the members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or employees of the Company, the votes casted shall not be calculated during the voting.
b) A shareholder cannot give a proxy to more than one person.
c) The granting of the proxy does not prevent the shareholder to attend the Meeting. In such condition, the votes calculated shall be the votes casted by the shareholder.
d) The proxy form(s) must be received by the Company through Corporate Secretary and Legal Affairs Division, Wisma Indocement, level 13, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, not later than Thursday, May 17, 2018 at 4:00 PM Western Indonesian Time.
- Shareholders or proxies are requested to submit the following documents to the officer at the registration counter before entering the Meeting room:
a) A photocopy of Collective Share Certificate or Written Confirmation for Meeting (KTUR) from Indonesian Central Securities Depository as evidence of their shares ownership;
b) A photocopy of Identification Card (KTP) or any other personal identification; and
c) For legal entity shareholder, photocopy of the latest Articles of Association and the latest deed of change on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
- Meeting materials can be obtained at the Company's Corporate Secretary and Legal Affairs Division or can be downloaded from the Company's website: <http://www.indocement.co.id>, since the date of this invitation.
- In order to facilitate an orderly Meeting, shareholders or proxies are kindly requested to be present in the Meeting room 30 minutes before the Meeting commences, i.e. 1:30 PM Western Indonesian Time.

Jakarta, April 30, 2018
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Board of Directors